

JURNAL KAJIAN BALI

Journal of Bali Studies

p-ISSN 2088-4443 # e-ISSN 2580-0698
Volume 10, Nomor 01, April 2020
<http://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali>

Terakreditasi Sinta-2, SK Dirjen Penguatan Riset dan
Pengembangan Kemenristekdikti No. 23/E/KPT/2019



Pusat Penelitian Kebudayaan dan Pusat Unggulan Pariwisata
Universitas Udayana

Kebijakan Pendidikan Bermotif Politik: Pengembangan Pendidikan Dasar Melalui Pembagian Laptop Gratis di Kabupaten Badung, Bali

**Agus Putra Mahendra¹, I Nyoman Darma Putra²,
Ida Bagus Gde Pujaastawa³**

^{1,2,3} Universitas Udayana

¹ Penulis Koresponden: ahendra2004@gmail.com

Abstract

Politically Motivated Education Policy: Development of Basic Education through Distribution of Free Laptops in Badung Regency, Bali

This paper analyzes the policy of distributing free laptops by the Badung Regency Government, Bali, to all 5th and 6th grade students at the public elementary school, but not to students at private school, in Badung Regency, Bali, since 2016 to develop basic education in the region. This topic is researched because it is a public policy development of basic education that was first implemented in Bali. The problem studied is how the response of stakeholders in the public elementary and private elementary schools to the policy. Data was obtained based on the results of interviews, document studies, and observations which were then analyzed by Hermeneutics theory and the Power of Knowledge. The analysis produced three conclusions. First, the policy was responded positively by supporters of the interests of public elementary schools. Second, the policy was responded to as a discriminatory policy by private elementary school stakeholders. Third, education policy is political sense for the interests of the authorities.

Keywords: public policy, primary education, free laptop, politically motivated of education policy, Badung Regency

Abstrak

Tulisan ini menganalisis tentang kebijakan pembagian laptop gratis oleh Pemkab Badung, Bali, untuk seluruh siswa kelas 5 dan 6 di SD Negeri, tetapi tidak diberikan kepada pelajar SD swasta, di Kabupaten Badung, Bali sejak tahun 2016 untuk mengembangkan pendidikan dasar di wilayahnya. Topik ini diteliti karena merupakan kebijakan publik pengembangan

pendidikan dasar yang pertama kali dilaksanakan di Bali. Masalah yang dikaji adalah bagaimana respons para pengampu kepentingan di SD Negeri dan SD swasta atas kebijakan tersebut. Data diperoleh berdasarkan hasil wawancara, studi dokumen, dan observasi yang kemudian dianalisis dengan teori hermeneutika dan kuasa pengetahuan. Analisis menghasilkan tiga simpulan. Pertama, kebijakan itu direspons positif oleh pengampu kepentingan SD Negeri. Kedua, kebijakan itu direspons sebagai kebijakan diskriminatif oleh pengampu kepentingan SD swasta. Ketiga, kebijakan pendidikan itu rasa politik untuk kepentingan penguasa.

Kata kunci: kebijakan publik, pendidikan dasar, laptop gratis, kebijakan pendidikan bermotif politik, Kabupaten Badung

1. Pendahuluan

Artikel ini menganalisis tentang kebijakan pembagian laptop gratis oleh Pemkab Badung untuk seluruh siswa kelas 5 dan 6 di SD Negeri di Kabupaten Badung, Bali, sejak tahun 2016. Masalah yang dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana respons dari pemangku kepentingan pendidikan dasar di Kabupaten Badung, termasuk di dalamnya respons siswa dan guru di SD Negeri yang mendapat laptop dan SD swasta yang tidak mendapat laptop gratis. Kajian juga diarahkan untuk melihat makna dari kebijakan pembagian laptop gratis ditinjau dari teori-teori kritis Kajian Budaya.

Kebijakan pembagian laptop gratis dimulai dengan membagikan 8.636 laptop untuk siswa kelas 6 SD Negeri oleh Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, di Lapangan Puspem Badung, Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi, Selasa, 13 Desember 2016. Selain sebagai penerapan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 2016-2021, pembagian laptop juga merupakan bagian dari kebijakan pendidikan dasar sembilan tahun bebas biaya di Kabupaten Badung (*ungasan.com*, 2016). Segera perlu disampaikan bahwa laptop itu hanya dibagikan kepada siswa SD Negeri, sementara siswa SD swasta tidak.

Pada era modern ini, tingkat kompetisi sumber daya manusia

(SDM) dalam banyak aspek kehidupan dipacu sampai titik maksimal. Di bidang pendidikan, hasrat menjadi yang terbaik tersebut menghadirkan peralatan yang diklaim bisa meningkatkan daya saing, salah satunya laptop.

Menurut Kepala Disdikpora Badung, Ketut Widia Astika, setiap proses pembelajaran harus didukung sarana prasarana yang betul-betul memadai sesuai kebutuhan. Laptop yang dibagikan Pemkab Badung itu bisa dibawa pulang oleh siswa dengan status hak guna pakai. Persaingan menyediakan piranti tersebut, oleh sebagian pihak dilihat sesungguhnya lebih pada pemenuhan aspek ekonomi kapitalis daripada menguatkan mutu pendidikan itu sendiri agar mendapat label sekolah berfasilitas canggih (Suda, 2009). Dengan label seperti itu, sekolah tersebut akan kian mendapat perhatian dari para orangtua dan siswa untuk masuk ke sana, meski dari segi kualitas belum tentu bagus. Menurut Atmadja (dalam Suda, 2011: 99) bila didekonstruksi, sekolah dengan berbagai labeling, termasuk sekolah dengan label canggih, dipercaya akan mencerminkan adanya logika Darwinisme Sosial yang menekankan bahwa manusia dalam masyarakat harus dapat bersaing. Dalam pandangan Marxisme (Piliang, 1998: 210) gaya hidup dilandasi satu ideologi tertentu yang menentukan bentuk dan arahnya, termasuk dalam pemilihan laptop yang digunakan dalam proses belajar siswa kelas 5 dan 6 SD Negeri di Badung.

Ada beberapa buku penunjang dan artikel penelitian yang relevan terhadap kajian ini, seperti Darmaningtyas (2015), Suda (2011), Erfina, Tahmid Sabri, Syamsiati (2012), Suciati dan Nur Hidayah (2011), dan Glendy Indra Tamaka, Eko Harry Susanto (2013). Namun, khusus terkait pembagian laptop untuk pelajar kelas 5 dan 6 SD Negeri belum ditemukan ada satu penelitian atau artikel yang spesifik membahasnya. Selain baru kali pertama dijalankan di Indonesia sejak tahun 2017, Pemkab Badung juga merupakan satu-satunya pemerintah daerah yang menjalankan program ini di Indonesia sampai tahun 2019.

2. Metode dan Teori

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif guna mengidentifikasi bagaimana kebijakan pembagian

laptop gratis tersebut berdampak terhadap sekolah swasta di Badung, serta bagaimana respons siswa atau orang tua dari SD yang tidak mendapat laptop gratis. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Badung, anggota DPRD Badung, sejumlah guru, siswa, dan orangtua siswa SD Negeri dan SD swasta di Badung. Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, juga status dan komentar di akun grup media sosial Facebook.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori hermeneutika dan teori kuasa pengetahuan. Hermeneutika atau penafsiran dipakai untuk menerjemahkan makna yang terkandung dalam suatu teks, baik di tingkat permukaan maupun masuk ke analisis lebih dalam dengan mencari makna tersembunyi dalam teks. Sementara teori kuasa pengetahuan yang dikemukakan oleh Michel Foucault (1980) menyatakan tidak ada pengetahuan tanpa kuasa, dan tidak ada kuasa tanpa pengetahuan. Teori ini digunakan untuk melihat bagaimana Pemkab Badung membentuk pengetahuan dengan kekuasaannya kepada masyarakatnya melalui wacana lewat media.

3. Kebijakan Publik Pemkab Badung yang Prorakyat

Pemkab Badung sejak zaman Bupati Giri Prasta (2016-2021) memperkenalkan beberapa kebijakan yang prorakyat. Kebijakan ini dimungkinkan karena APBD Badung yang cukup besar, yang sebagian besar diperoleh dari sektor pariwisata berupa pajak pembangunan I (PBI). Badung juga membuat kebijakan lain untuk dengan tujuan menyejahterakan seluruh rakyatnya seperti program bebas pajak bumi dan bangunan (PBB) (*antaranews.com*, 2017). Ada juga santunan kematian senilai Rp 10 juta, santunan penunggu pasien maksimal Rp 5 juta, jaminan kesehatan Krama Badung Sehat (KBS), dan pembagian dana bansos untuk pelbagai kegiatan masyarakat. Tak ketinggalan adalah pembagian laptop gratis untuk siswa kelas 5 dan 6 SD Negeri di Badung.

Ada tiga hal yang melatarbelakangi kebijakan pembagian laptop gratis tersebut. Pertama, kondisi APBD Badung dinilai mampu menyelenggarakan pendidikan dasar gratis. Kedua,

Pemkab Badung ingin meningkatkan taraf kualitas pendidikan dasar warganya. Ketiga, sebagai wujud pelaksanaan janji kampanye saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Badung 2015. Kebijakan publik ini menjadi media bagi Bupati Giri Prasta untuk mendekatkan diri dengan masyarakat (Foto 1).



Foto 1. Bupati Giri Prasta (keempat dari kiri) dalam menghadiri HUT ke-37 Seka Teruna Abdi Yowana Praja Banjar Selat, Desa Sobangan, Kecamatan Mengwi, Sabtu, 2/11/2019 (Foto: Humas Pemkab Badung).

Kebijakan pendidikan dasar bebas biaya itu dijalankan dengan istilah “program sekolah gratis” untuk tingkat SD negeri dan SMP Negeri di Badung sejak tahun ajaran baru 2016-2017. Di tingkat SLTA tidak ada penerapan program ini karena kewenangan pengelolaan SLTA sejak tahun 2017 berada di Pemerintah Provinsi Bali, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengatur kewenangan mengelola pendidikan menengah (SMA/SMK) dan pendidikan khusus dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi.

Tidak hanya melarang pungutan di SD dan SMP Negeri, Pemkab Badung juga menyiapkan anggaran Rp 25 miliar lebih untuk pengadaan seragam sekolah siswa baru. Ada enam item seragam dan perlengkapan sekolah yang diterima siswa baru SD

maupun SMP, yakni seragam merah putih beserta atribut, seragam endek sekolah, seragam Pramuka beserta atribut, sepatu dan kaos kaki, tas sekolah, serta pakaian olah raga. Pengadaan seragam beserta atribut untuk SD pada tahun 2017 dianggarkan Rp 12,2 miliar, sedangkan untuk SMP dengan anggaran Rp 13,06 miliar. Anggaran senilai itu terlihat sangat kecil mengingat APBD Badung pada tahun 2016 mencapai Rp 5,4 triliun lebih (*Bali Express*, 2017). Landasan hukum program ini yang digunakan Pemkab Badung adalah mengacu Peraturan Pemerintah (PP) 47 tahun 2008, juga PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang diubah dengan PP Nomor 66 tahun 2010. Juga Undang-Undang Nomor Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pemkab Badung juga memberi anggaran kepada sekolah negeri sampai hal terkecil yang dibutuhkan, termasuk kebutuhan untuk kegiatan agama sehari-hari seperti *aci-acian* (sesajen). Tak hanya membebaskan biaya sekolah, kebijakan di bidang pendidikan yang baru kali pertama diwujudkan di Bali juga dan sudah dijalankan Pemkab Badung adalah mengirim pelajar Badung untuk kuliah di luar negeri (*DenPost*, 2018).

4. Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Pemkab Badung membagikan laptop gratis mendapat sambutan pro dan kontra. Berikut dibahas pendapat mereka yang setuju dan yang protes. Pembahasan juga menganalisis latar belakang dan proses pengambilan keputusan.

4.1 Kebijakan Disambut Positif

Menjabat Bupati Badung mulai tanggal 17 Februari 2016, Giri Prasta mencanangkan Program Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB). Itu dituangkan dalam lima program prioritas yakni bidang sandang, pangan, dan papan; kesehatan dan pendidikan; jaminan sosial dan ketenagakerjaan; adat, agama dan budaya; dan, pariwisata. Badung juga memiliki program Tri Kona yakni warga Badung yang lahir, hidup, dan mati ditanggung pemerintah (*DenPost*, 9/4/2019). Khusus di bidang pendidikan, Badung juga memiliki kebijakan pembagian laptop gratis untuk

siswa SD Negeri di Badung.

Salah satu pengertian kebijakan publik, menurut Harold Laswell (dalam Nugroho, 2003) yakni “suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu”. Menurut Wahyudi dkk. (dalam Setyawan, 2017), kebijakan publik diartikan sebagai seperangkat aturan mengenai pernyataan, imbauan atau ajakan dari pemerintah kepada warganya, sedangkan menurut Said (2018) kebijakan publik sesungguhnya untuk kemanfaatan seluruh masyarakat dan bangsa. Suatu kebijakan publik dijalankan ketika sudah melalui sejumlah tahapan dan kajian.

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Badung, Ketut Widia Astika, mengatakan program pembagian laptop gratis ini berawal dari visi-misi Bupati yang dijabarkan dalam PPNSB, salah satu program prioritasnya bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam pengelolaan kependudukan yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021, Bupati ingin para siswa menguasai teknologi informasi (TI) sejak pendidikan dasar, terutama menghadapi era Revolusi Industri 4.0, dengan Disdikpora sebagai intansi pelaksana kebijakan ini.

Pemerintah mengkaji bahwa dengan memberikan laptop kepada siswa diharapkan dapat meningkatkan wawasan pengetahuan di bidang teknologi dan menunjang sistem pembelajaran di sekolah. Siswa diharapkan dapat memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi komputer (TIK) pada usia dini sehingga mempunyai mutu pendidikan berkualitas dan daya saing. Berhubung pembagian laptop ini merupakan realisasi program kampanye, dapat diinterpretasikan bahwa apa yang dikatakan sebagai “kajian” oleh Widia Astika dilakukan Disdikpora setelah kebijakan tersebut dibuat.

Program ini sudah diketahui DPRD Badung yakni salah satu program unggulan pasangan yang terpilih saat itu, sehingga sangat dipahami bahwa semua program yang disampaikan dalam visi-misi Bupati dapat direalisasikan. Tentunya anggota Dewan sudah paham dalam konteks peningkatan kualitas pendidikan (Widia Astika, wawancara 25/9/2019).

Pendapat Widia Astika justru memperlihatkan ada keanehan dari kebijakan itu sendiri, karena umumnya kajian dilakukan sebelum memutuskan sesuatu, bukan setelah keputusan diambil. Yang terjadi pada kebijakan pembagian laptop gratis justru Disdikpora seakan-akan membuat kajian yang dapat digunakan sebagai pembenar gagasan Bupati Giri Prasta, agar janji kampanye pembagian laptop dapat terlaksana, terlepas apakah sesungguhnya pembagian laptop tersebut diperlukan atau tidak. Pernyataan tersebut juga dapat dimaknai bahwa sesungguhnya kebijakan tersebut lebih bermuatan politis daripada mengembangkan pendidikan dasar itu sendiri.

Kenyataan bahwa kajian dilakukan setelah program siap dijalankan itu juga bisa dirunut dari pernyataan Ketua Komisi IV DPRD Badung, A.A. Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, yakni pembagian laptop memiliki nilai positif untuk mengenalkan TI kepada siswa di jenjang pendidikan dasar. Salah satu isi kampanye pasangan calon Giri Prasta-Ketut Suiasa (Giriasa) adalah berjanji membagikan laptop gratis kepada siswa kelas 5 SD ke atas, termasuk SMP. Legislatif menilai pasangan Giriasa pada waktu pemaparan visi-misi sudah menghitung berapa jumlah siswa SD, selain juga melihat potensi kekayaan Badung sangat memungkinkan untuk mewujudkan kebijakan tersebut. Laptop yang dibagikan Pemkab tersebut bermerek Hawlett Packard Notebook tipe 245 G5 itu dengan disematkan software *Word 2016*, *Excel 2016*, *Power Point 2016*, *Windows 10 Update*, *Authoring Tools*, *Google Chrome*, *HP Classroom*, dan *Player* (berisi lambang Pemkab Badung).

Penilaian positif atas kebijakan pembagian laptop gratis tersebut diberikan Ni Made Sri Wiratni, orangtua siswa di SDN 11 Jimbaran, Kuta Selatan, yang menyebutkan anaknya lebih banyak dapat belajar di rumah memakai laptop, dan itu juga berarti lebih cepat mengenal pembelajaran lewat internet. Pembagian laptop tersebut juga direspons sebagai kebijakan yang merata dan berkeadilan sosial. Informan Dewi Indrawati, juga setuju pembagian laptop itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Badung, meski laptop itu tidak terlalu sering dipakai anaknya di rumah. Bagi Komang Teguh Semadi Putra, siswa kelas 5 SDN 3 Kerobokan, laptop berguna untuk menyalin tugas dari guru, dan

belajar jadi lebih menyenangkan. Kegembiraan serupa dirasakan I Putu Marteo Gunawan, siswa kelas 6 SDN 3 Abiansemal Dauh Yeh Cani (Foto 2).



Foto 2. Para siswa SDN 2 Kerobokan, Kuta Utara memakai laptop di sekolah (Foto: Agus Adi Pramana).

Bagi kalangan guru seperti Made Suardika, guru kelas 6 di SDN 2 Carangsari, Petang, laptop itu sangat membantu proses belajar para siswanya. Dia melihat siswa lebih ada inisiatif dan antusias dalam mencari tahu apa yang dirasa kurang diketahui melalui internet menggunakan laptop. Guru juga lebih mudah dalam mengajar. Pendek kata, sambutan positif atas kebijakan pembagian laptop disampaikan merata oleh guru dan siswa dari SDN yang mendapatkannya.

4.2 Kebijakan Diskriminatif

Pembagian laptop khusus untuk SD Negeri tersebut mengundang respons negatif dari kalangan pengampu kepentingan sekolah swasta. Pemikiran yang mendasari protes tersebut yakni bahwa siswa yang sekolah swasta juga sama-sama anak warga Badung, dan itu berarti mereka berhak mendapat fasilitas yang sama seperti diterima di sekolah negeri, kenyataannya mereka tidak diberikan sama sekali.

Penilaian tidak adil tersebut antara lain muncul karena siswa di sekolah negeri sudah mendapat fasilitas bebas membayar SPP, tidak seperti di sekolah swasta yang harus membayar SPP setiap bulan. Seperti dituturkan Ayu Manika, siswa kelas 6 SD Tegal Jaya, Kerobokan Kaja bahwa pembagian laptop tersebut menjauhkan keseimbangan perhatian pemerintah kepada para siswa SD di wilayahnya, dan belum perlu di tingkat SD. Keadilan bagi sekolah swasta adalah adanya pemberian fasilitas untuk semua siswa tanpa terkecuali, agar hasil akhirnya adalah semua siswa sama-sama memiliki kemampuan di bidang komputer. Chika Ramanda Putri, siswa SD Nusa Dua, Kuta Selatan, menilai pemerintah wajib memberi laptop ke swasta supaya tidak ada kecemburuan sosial, dan sama-sama bisa berkembang terkait teknologi dan pengetahuan.

Guru juga jadi lebih mudah menerangkan pelajaran. Kalau bisa *ya* fasilitas yang diberikan pemerintah harus sama antara negeri dan swasta (Chika Ramanda Putri, wawancara 14 Agustus 2019).

Dalam pandangan mereka, bentuk keadilan itu adalah ketika apa yang diberikan kepada sekolah negeri juga diberikan kepada sekolah swasta. Bila pemerintah ingin membuat anak SD di Badung pintar dan melek teknologi, maka seharusnya pemberian fasilitas tidak lagi membedakan antara negeri dan swasta. Mereka juga melihat pembagian laptop yang dibawa pulang itu kurang bermanfaat kepada siswa SD negeri, karena laptop mudah dan dapat digunakan untuk hal-hal di luar kepentingan pendidikan.

Gede Utama, guru SD Tegal Jaya, juga menyampaikan ketidakadilan dalam kebijakan pemerintah ini. Dia mengakui bahwa pemerintah sudah membantu kelangsungan hidup sekolah swasta dengan memberi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tetapi bantuan serupa juga diterima sekolah negeri. Karena itu, ketika pemerintah membagikan laptop gratis, sepatutnya sekolah swasta juga diberi bantuan serupa. Alasannya, sekolah swasta memiliki andil pengembangan pendidikan dasar dan ikut mengangkat nama Badung jika mendapat prestasi dalam suatu kompetisi. Apalagi kondisi keuangan Pemkab Badung dinilai masih mampu untuk berbuat yang sama kepada sekolah swasta (Foto 3).

Nugroho (2003: 54) mengatakan kebijakan publik adalah



Foto 3. Siswa di SD Tiara Nirwana belajar komputer (Foto: Alit Susanti).

hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan, dan hal-hal yang diputuskan tidak dikerjakan atau dibiarkan. Sementara menurut Setyawan (2017: 111) implementasi kebijakan publik juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Ketika Pemkab Badung memutuskan untuk membagikan laptop kepada siswa kelas 5 dan 6 SD Negeri, hal itu karena sekolah-sekolah tersebut dinilai strategis dan sejalan dengan kepentingan pemerintah dan kepala daerahnya. SD swasta tidak mendapat bantuan serupa karena dinilai tidak memiliki nilai strategis untuk kepentingan pemerintah daerah, maka kebijakan itu tidak dilakukan. Selain itu juga dipengaruhi kondisi keuangan Pemkab Badung yang tidak selalu stabil dari tahun ke tahun akibat banyak faktor eksternal.

Terkait keuangan daerah, pendapatan Badung tahun 2018 meleset dari target, dan itu berdampak terhadap banyak proyek yang ditunda. Selain itu, bantuan hibah juga banyak yang tidak cair. Target pajak di APBD induk 2018 dipasang Rp 4,9 triliun lebih, tapi dikoreksi di APBD Perubahan menjadi Rp 4,1 triliun lebih. Menurut Kepala Badan Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Badung, I Made Utama, dari target Rp 4,1 triliun, per 20 Desember lalu tercapai Rp 3,8 triliun lebih (*radarbali.jawapos.com*, 2019). Alasan

melesetnya target capaian pendapatan itu dijadikan alasan, padahal memang sejak awal sekolah swasta tidak menjadi perhitungan akan mendapat laptop.

Nita Santari, guru di SD Tiara Nirwana, berharap jika pemerintah memberi laptop, maka sebaiknya ditujukan untuk sekolah, bukan untuk siswanya, apalagi sampai dibawa pulang. Melalui guru, pengetahuan itu ditransfer ke siswa. Freire (2007: 85) mengatakan penulis teks yang baik adalah penulis yang teksnya bisa didiskusikan oleh guru dengan siswanya di kelas. Hal ini mengandaikan terjadinya proses interaksi aktif antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran, agar siswa benar-benar jelas mengenai objek yang dipelajari. Kondisi tersebut dapat tercapai hanya jika guru lebih menguasai tentang objek tersebut dibanding siswanya, untuk kemudian pengetahuan tersebut ditransfer ke siswa melalui proses diskusi.

Harapan agar sekolah swasta mendapat perhatian setara dengan negeri turut disuarakan Ketut Widarta, orangtua siswa. Akibat tidak adilnya perhatian kepada sekolah negeri dan swasta itulah maka terjadi masyarakat saat ini berebut sekolah negeri, dan sekolah swasta dinomorduakan. Kendati digratiskan tapi jika sekolah swasta itu tidak berkualitas, tetap saja orang memilih sekolah negeri.

Menelisik harapan yang disampaikan pengampu kepentingan di SD swasta, para siswa lebih kepada sesuatu yang bersifat nyata dan mudah dilihat dapat diselesaikan oleh pemerintah, yakni membayar SPP, memberi bantuan laptop, serta membantu membayar buku pelajaran. Di sisi lain orangtua dan guru lebih berharap kepada alih teknologi dan kebijakan yang tidak sekadar menjadikan sekolah swasta sebagai lembaga pendidikan kelas dua setelah negeri. Dengan adanya kesetaraan fasilitas, sekurang ada tiga hal yang dapat terwujud. Pertama, tidak ada siswa yang tidak mendapat sekolah karena daya tampung sekolah sangat luas terbuka. Kedua, tidak terjadi ketimpangan kualitas pendidikan antara sekolah negeri dan swasta. Ketiga, kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dapat lebih adil dirasakan warga Badung.

4.3 Kebijakan Rasa Politik dan Tergesa-gesa

Dari wawancara dengan sejumlah guru di SD Negeri, tidak ada yang tahu bagaimana latar belakang dan pertimbangan sampai Disdikpora Badung membeli laptop tersebut. Yang mereka ketahui hanyalah diminta mengambil laptop tersebut untuk dibagikan kepada murid-muridnya di kelas 5 dan 6. Seperti dikatakan Made Suardika, guru SDN 2 Carangsari, Kecamatan Petang, yang tidak tahu mengapa apa dasar kajian Pemkab Badung sampai membagikan laptop untuk siswa kelas 5 dan 6 SD Negeri.

Saya hanya diminta Ibu Kepala Sekolah untuk mengantar anak-anak ke Pemkab Badung mengambil pembagian laptop. Mungkin Ibu Kepala yang lebih tahu (Made Suardika, wawancara 12/12/ 2019).

Pernyataan bernada serupa disuarakan Agus Adi Pramana, guru SDN 2 Kerobokan, yang tidak pernah diberitahu baik oleh kepala sekolah maupun Disdikpora Badung tentang dasar kajian pembagian laptop tersebut. Dia mengajarkan dasar-dasar Microsoft Office, seperti Microsoft Word, Excell, dan Power Point.

Berdasarkan pernyataan dua guru tersebut, berarti kebijakan yang diambil tersebut bersifat *top down* karena tanpa melibatkan pemangku kepentingan di SD Negeri sama sekali. Tidak ada penyerapan aspirasi atau usulan dari bawah (*bottom up*), padahal salah satu prinsip *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dalam kebijakan publik menurut Crescent (dalam Hayat, 2018) adalah adanya partisipasi masyarakat. Sebagai pembanding, kebijakan yang tidak tergesa-gesa dan tepat sasaran dengan melihat situasi dan aspirasi masyarakat adalah seperti dijalankan Pemkab Gianyar yang menyediakan sarana transportasi gratis untuk angkutan sekolah dengan 150 armada dan 29 trayek. Transportasi ini memanfaatkan angkutan umum yang sudah ada dan bisa dinikmati oleh semua siswa, bukan diskriminatif untuk siswa negeri saja (*DenPost*, 23/12/2018).

Selain tidak menyerap aspirasi atau usulan dari bawah, kajian dari kebijakan tersebut tergesa-gesa karena kurang memperhitungkan aspek lain yang tidak kalah penting untuk dikaji. Pemerintah tidak menyediakan infrastruktur terkait laptop, misalnya ruangan kelas berpendingin udara. Pemerintah

juga tidak memiliki aturan baku standar tentang bagaimana siswa memperlakukan laptop tersebut ketika di rumah, seperti membersihkan layar dengan cairan khusus, atau mengisi baterai sampai penuh sebelum digunakan di sekolah. Hal lain yang tidak dipikirkan secara komprehensif oleh pemerintah adalah bahwa laptop tidak bisa berdiri sendiri, karena laptop hanya dipakai mengetik, sedangkan hasil ketika harus dicetak dengan mesin printer. Alat ini yang justru tidak dibagikan oleh pemerintah.

Widia Astika memang mengatakan bahwa instansinya sudah memberi pemahaman kepada anak didik bagaimana cara memperlakukan barang elektronik yang dibeli seharga Rp 8,9 juta per unit tersebut dengan bertanggung jawab dan bijaksana. Namun, sejumlah siswa mengaku tidak pernah mendapat penjelasan dari guru bagaimana cara merawat laptop itu. Sampai dengan Juli 2019, Kabid Gedung dan Prasarana Disdikpora Badung I Putu Roby Widya Harsana mengatakan, ada 33 unit laptop untuk SD Negeri dilaporkan hilang dan 48 unit dinyatakan rusak (*Tribunnews*, 2019).

Terwujudnya kebijakan pembagian laptop gratis oleh Pemkab Badung tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari faktor persetujuan dan dukungan politik dari DPRD Badung sebagai pengelola anggaran daerah. Apalagi PDIP menjadi partai penguasa di DPRD Badung, dan Bupati Giri Prasta merupakan Ketua DPC PDIP Badung. Sementara Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, merupakan Sekretaris DPC PDIP Badung yang juga bawahan Giri Prasta di partai.

Berikutnya, pembagian laptop tersebut juga menjadi alat bagi Bupati untuk pencitraan positif dirinya di masyarakat melalui sejumlah media massa dengan berita berbayar (*advertorial*), terutama di media cetak. Hal menonjol yang dibingkai dari pemberitaan berbayar tersebut adalah bahwa pembagian laptop merupakan salah satu bukti bahwa Giri Prasta merupakan Bupati *bares* atau murah hati, selain dari kebijakan lain seperti rutusnya penyerahan hibah kepada elemen masyarakat Badung. *Branding bupati bares* (BB) tersebut yang kemudian digunakan tim media Bupati untuk mengglorifikasi sosok Giri Prasta di media sosial melalui akun grup di Facebook yakni Suara Badung dan Metro Bali. Dengan demikian, kebijakan yang semula ditujukan untuk

mengembangkan pendidikan dasar di Badung bergeser menjadi kebijakan untuk menaikkan citra politik Bupati. Sampai di sini, semakin kuat dugaan bahwa kebijakan publik laptop gratis adalah kebijakan dari, oleh, dan untuk kepentingan politik penguasa.

Dalam perbincangan di Facebook tersebut, penonjolan teks Bupati *bares* juga berkembang menjadi pencitraan bahwa Giri Prasta adalah sosok merakyat yang sangat layak menjadi calon Gubernur Bali di masa depan. Bungin (2018) mengatakan pemimpin modern yang lahir dari rakyat, harus memiliki pencitraan yang kuat agar dapat memiliki legitimasi masyarakat dalam memimpin. Sementara Haryatmoko (2007: 84) menyebut seorang pejabat tidak bisa tidak peduli dengan popularitas, karena popularitas tidak lagi sekadar nama baik, melainkan terkait dengan persetujuan masyarakat terhadap kebijakan publik yang diambil.

Kuatnya penokohan Giri Prasta sebagai Bupati *bares*, salah satunya karena kebijakan pembagian laptop, sesungguhnya mengandung kontradiksi. Karena pembagian laptop hanya ditujukan untuk siswa SD Negeri, kebijakan itu justru tidak mengindahkan Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Kemudian Pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat (*jogloabang.com*).

Dalam kehidupan kontemporer, manusia tidak bisa lagi membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan (Budiman, 1987 dalam Ketut Suda, 2011: 101). Demikian pula dalam konteks ini, pemerintah dalam memenuhi kewajiban menyediakan fasilitas pendidikan untuk rakyatnya tidak lagi melihat sisi nilai guna, dalam artian untuk pencerahan dan pendewasaan anak. Justru yang menonjol adalah dari segi nilai simbol. Fungsi pembentukan simbol ini adalah satu di antara kegiatan dasar manusia yang merupakan proses fundamental dari pikiran, dan berlangsung setiap waktu. Prestasi-prestasi manusia bergantung pada penggunaan simbol-

simbol (Susanne K Langer dalam Sihabudin, 2011:64), dan yang dikejar dalam kehidupan sosial adalah status simbol-simbol seperti piala, pangkat, dan lain sebagainya.

Mengacu dari pendapat tersebut, sekolah di Badung tidak lagi semata-mata dipandang sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan dan kecerdasan, tapi dipandang juga sebagai wahana untuk menentukan kelas atau status sosial tertentu, dalam hal ini lebih kepada status sosial kepala daerahnya. Laptop sebagai simbol peralatan modern direpresentasikan sebagai simbol pemikiran modern kepala daerahnya dalam mengelola pendidikan. Sekolah tidak lagi sebagai sarana pendidikan, melainkan simbol kekuasaan kepala daerah dalam memenuhi “kebutuhan” rakyatnya di bidang pendidikan modern yang unggul dan berkualitas. Baudrillard (dalam Cavallaro, 2004) juga mengatakan bahwa kekuasaan melanggengkan dirinya sendiri dengan cara terus-menerus menjual fantasi-fantasi kita dan menampik bahwa itu fantasi. Kekuasaan mengklaim bersifat nyata dan menawarkan orang kebenaran yang sebenarnya.

Hal ini terlihat dari tidak adanya suara protes atau keluhan orangtua siswa SD Negeri ketika laptop dibagikan. Sebagaimana penjelasan politik citra dan politik konsumsi sebelumnya, para orangtua pun turut terpengaruh dengan pengetahuan yang diwacanakan Bupati Badung bahwa laptop tersebut sebagai media baru untuk meningkatkan kualitas dan menunjang kompetensi siswa. Media baru juga telah memberi orang muda identitas baru untuk melakukan hal-hal baru di dunia yang baru (Heryanto, 2018). Menurut Foucault (2012: 325), pengetahuan adalah apa-apa yang diucapkan seseorang dalam satu praktik diskursif dan dispesifikasi oleh kenyataan tersebut, dan diskursus atau wacana adalah sekumpulan teks atau tuturan yang mempunyai arti. Wacana tidak hanya mengatur apa yang bisa dikatakan dalam kondisi sosial dan budaya tertentu, tapi juga siapa yang dapat bicara, kapan, dan di mana (Barker, 2014: 79). Wacana sebagai sederet pernyataan yang relatif terikat pada kaidah, sehingga menentukan batas-batas pada apa yang memberi makna (Foucault dalam Jorgensen & Philips, 2010).

Kekuasaan bukanlah milik, tetapi strategi dan selalu bertautan dengan pengetahuan. Kekuasaan memproduksi pengetahuan, dan pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan, menyediakan kekuasaan (Aur, 2005). Dengan Pemkab Badung sudah membeli dan membagikan laptop tersebut, maka lunas pula utang janji kampanye saat Pilkada Badung 2015. Apakah laptop tersebut benar-benar berguna untuk proses pembelajaran, hal tersebut sama sekali tidak dibahas. Spesifikasi laptop seperti apa yang sesungguhnya benar-benar dibutuhkan siswa juga tak ada penjelasan lebih rinci.

5. Simpulan

Pembagian laptop gratis yang dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan tersebut mendapat respons seperti berikut. Pertama, pengampu kepentingan SD Negeri merespons sebagai kebijakan positif. Respons ini wajar karena mereka adalah kelompok yang menikmati manfaat dari kebijakan tersebut, di mana para siswanya mendapat laptop gratis dari Pemkab Badung. Kedua, pengampu kepentingan SD swasta merespons sebagai kebijakan diskriminatif. Hal ini juga wajar karena mereka termasuk kelompok yang dianaktirikan, tidak mendapat laptop sama sekali. Ketiga, kebijakan pendidikan yang pro-rakyat itu memiliki 'rasa politik' yang kuat dan diambil secara tergesa-gesa, yakni untuk kepentingan politik pencitraan atau pencitraan politik.

Kebijakan publik pembagian laptop tersebut juga seperti satu koin bersisi dua. Di satu sisi dijalankan untuk alasan peningkatan mutu pendidikan dasar di Kabupaten Badung, di sisi lain menjadi media pencitraan politik penguasa dan alat memuluskan pertarungan dalam pilkada untuk masa jabatan kali kedua. Meski demikian, perlu juga dicatat bahwa pencitraan positif yang dibayangkan akan datang dari mereka yang mendapatkan laptop gratis, pada saat yang sama akan mendapatkan efek kebalikan dari kelompok sekolah swasta yang murid-muridnya dianaktirikan.

Daftar Pustaka

AntaraneWS.Com. (2017). "Bupati Badung Gratiskan PBB P2", sumber: <https://bali.antaraneWS.com/berita/106265/bupati-badung->

gratis-pbb-p2 Diakses 15/10/2019.

- Aur, Alexander. (2005). 'Pascastrukturalisme Michel Foucault dan Gerbang Menuju Dialog Antarperadaban', dalam *Teori-teori Kebudayaan*. Mudji Sutrisno & Hendar Putranto (eds). Bandung: Kanisius.
- Bali Express. (2017). "Seragam Gratis di Badung Molor Karena Data Siswa Belum Rampung", <https://baliexpress.jawapos.com/read/2017/07/18/1841/seragam-gratis-di-badung-molor-karena-data-siswa-belum-rampung> Diakses 21/8/2019.
- Barker, Chris. (2014). *Cultural Studies: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Bungin, Burhan. (2018). *Komunikasi Politik Pencitraan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Cavallaro, Dani. (2004). *Teori Kritis dan Teori Budaya*. Yogyakarta: Niagara.
- Darmaningtyas. (2015). *Pendidikan yang Memiskinkan*. Malang: Intrans Publishing.
- DenPost*. (2018). "Giri Prasta Terima 20 Calon Mahasiswa Beasiswa ke Luar Negeri". *DenPost*, 15 September, Halaman 3.
- DenPost*. (2019). "Ngenteg Linggih di Pura Ulun Desa, Tabanan. Suiasa Serahkan Dana Hibah Rp 1,3 Miliar Lebih", *DenPost*, 9 April, Halaman 3.
- Erfina, Tahmid Sabri, Syamsiati. (2012). *Penggunaan Audio Visual Laptop Untuk Meningkatkan Keterampilan Menyimak Cerita Anak Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia*. Sumber: <https://media.neliti.com/media/publications/210439-none.pdf> Diakses 3/7/2019.
- Foucault, Michel. (2012). *Arkeologi Pengetahuan*. (Inyiak Ridwan Muzir, Pen). Yogyakarta: Ircisod.
- Haryatmoko. (2007). *Etika Komunikasi, Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hayat. (2018). *Kebijakan Publik, Evaluasi, Reformasi dan Formulasi*. Malang: Intrans Publishing.
- Heryanto, Ariel. (2018). *Identitas dan Kenikmatan, Politik Budaya Layar Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Jogloabang.Com. (2019). "UU 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional", sumber: <https://www.jogloabang.com/pendidikan/uu-20-tahun-2003-tentang-sistem-pendidikan-nasional>. Diakses 20/10/2019.

- Jorgensen, Marianne W, dan Luoise J. Philips. (2010). *Analisis Wacana Teori dan Metode*. (Imam Suyitno dkk, Pen). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lubis, Akhyar Yusuf. (2016). *Filsafat Ilmu Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Nugroho D, Riant. (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Piliang, Yasraf Amir. (1998). *Sebuah Dunia yang Dilipat*. Bandung: Mizan.
- Setyawan, Dody. (2017). *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Inteligencia Media.
- Sihabudin, Ahmad. (2011). *Komunikasi Antarbudaya, Satu Perspektif Multidimensi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suciati dan Nur Hidayah. (2011). *Penggunaan Laptop Dalam Perkuliahan di Kelas, Manfaat atau Mudharatkah?*. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 17, Nomor 3, Mei 2011, 291-298.
- Suda, I Ketut. (2011). *Komodifikasi Pendidikan dan Kanibalisme Intelektual dalam Proses Pembelajaran di Sekolah*, dalam *Jelajah Kajian Budaya*. I Made Suastika, I Nyoman Kutha Ratna, I Gede Mudana (eds). Denpasar: Pustaka Larasan.
- Sugiartha, I Komang. (2009). *Penggunaan Telepon Seluler Sebagai Representasi Gaya Hidup Siswa SMA Negeri 2 Denpasar*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Tamaka, Glendy Indra dan Eko Harry Susanto. (2013). *Pencitraan Aburizal Bakrie Melalui Iklan Televisi*. *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol. 1. Nomor 1, Juli 2013, 32-50.
- Ungasan.Com. (2016). "Di Badung 8636 Siswa Kelas 6 Dapat Laptop", sumber: <http://www.ungasan.com/2016/12/di-badung-8636-siswa-kelas-vi-dapat> Diakses 15/10/2019.